

## PEMBANGUNAN DAERAH

PERBUP TABALONG NO. 22, BD 2025/NO. 22, 8 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Abstrak : - bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah oleh Kepala Daerah, dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, membutuhkan langkahlangkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah, untuk percepatan pencapaian target 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, maka diperlukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 7 Tahun 2024.
  - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka pendampingan percepatan pembangunan di Daerah sehingga sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.  
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi: a. pembentukan dan kedudukan; b. tugas dan fungsi; c. Sekretariat; d. keanggotaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian; e. mekanisme kerja; f. hak keuangan; g. pelaporan; dan h. pendanaan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2025.